

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM KONTEKS KE- TAHANAN NASIONAL (Tinjauan Konseptual)

Ahmad Syafii Maarif*)

Berbicara tentang hubungan agama dan negara dalam perspektif ketahanan nasional untuk negara pulau dan masyarakat plularistik seperti Indonesia tetap saja relevan sepanjang waktu. Sekalipun Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bersemboyan bhinneka tunggal ika, gangguan dan bahkan ancaman terhadap kesatuan dan ketahanan nasional selama 50 tahun merdeka telah terjadi berulang-ulang. Faktor agama sering pula dijadikan pemicu untuk mencabik-cabik republik ini, sekalipun barangkali hanya sekadar untuk menggalang solidaritas massa. Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia tidak pernah bercorak monolitik. Pernah terjadi sekelompok kecil umat Islam di beberapa tempat di Indonesia melakukan pemberontakan senjata terhadap pemerintah pusat karena ketidakpuasan politik dan ekonomi. Sebagian pemberontak itu ingin mendirikan negara Islam. Tapi pernah pula terjadi sekelompok umat Kristen dan Katolik dari Indonesia bagian Timur ingin berdiri di luar republik jika mereka diperlakukan diskriminatif dalam konstitusi, demi memenuhi tuntutan mayoritas rakyat beragama Islam melalui para tokohnya, sebagaimana yang akan kita bicarakan lebih jauh di bawah ini. Setelah pendahuluan ini, selanjutnya akan kita diskusikan berturut-turut masalah hubungan agama dan negara dalam perspektif ketahanan nasional setelah lebih dulu kita tengok peristiwa sejarah yang berkaitan dengan topik pembicaraan kita hari ini. Sebelum penutup akan kita tengok pula keterkaitan antaraagama, negara, ketahanan nasional, dan masalah keteladanan.

*) Ketua Umum PP Muhammadiyah

Kata dan dampaknya terhadap masalah ketahanan dan kesatuan nasional

Belum selang beberapa jam setelah teks proklamasi dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945 sebagai lonceng berdirinya negara baru, sebuah krisis politik yang disebabkan oleh terganggunya hubungan antarumat beragama telah terjadi. Krisis itu datang secara tiba-tiba. Jika pada waktu itu tidak ditangani secara arif dan sabar, kesatuan dan ketahanan nasional akan mengalami kegoncangan dan bahkan dalam bahaya. Pemicu utamanya berkaitan dengan persoalan kata dalam Pancasila dan UUD 1945. Berkat kepaiawaian lobi Hatta sebagai negarawan dengan tokoh-tokoh Muslim yang menduduki posisi strategis pada saat-saat pembentukan negara baru itu, krisis ini dalam tempo yang relatif singkat dapat diatasi. Mengapa persoalan kata dapat menimbulkan krisis? Karena kata di sini merupakan simbol sebuah konsep yang punya implikasi luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wara Islam dinilai terlalu ditonjolkan dalam konstitusi. Ini dirasakan oleh kelompok minoritas sebagai tindakan diskriminatif konstitusional. Untuk menyegarkan ingatan kita kepada kejadian krusial itu, penuturan Hatta perlu kita rekamkan kembali:

Pada sore harinya aku menerima telepon dari Tuan Nishijama, pembantu Admiral Maeda menanyakan dapatkah aku menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia Nishijama sendiri akan menjadi juru bahasa. Aku persilakan mereka datang Opsir itu yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang diawasi oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan Diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika "diskriminasi" itu ditinggalkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. A.A. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa

dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menanda-tanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun.¹

Sebagai seorang pejuang yang sudah kenyang dengan penderitaan dalam bui dan pembuangan politik di masa kolonial, hati Hatta seperti teriris bila republik yang baru berusia beberapa jam itu harus pecah karena alasan kata dengan muatan agama anutan golongan mayoritas yang dicantumkan dalam konstitusi. Kita ikuti selanjutnya kesaksian tokoh kita ini:

Karena opsir Angkatan Laut Jepang itu sungguh-sungguh menyukai Indonesia Merdeka yang bersatu sambil mengingatkan pula kepada semboyan yang selama ini didengung-dengungkan "Bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh", perkataannya itu berpengaruh juga atas pandanganku. Tergambar di mukaku perjuanganku yang lebih dari 25 tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan, untuk mencapai Indonesia Merdeka bersatu dan tidak terbagi-bagi. Apakah Indonesia Merdeka yang baru saja dibentuk akan pecah kembali dan mungkin terjajah lagi

karena suatu hal yang sebenarnya dapat diatasi? Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatera akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik divide et empera, politik memecah dan menguasai. Setelah aku terdiam sebentar kukatakan kepadanya, bahwa esok hari dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan akan kukemukakan masalah yang sangat penting itu. Aku minta ia menyabarkan sementara pemimpin-pemimpin Kristen yang berhati panas dan berkepala panas itu, supaya mereka jangan terpengaruh oleh propaganda Belanda.²

Kesepakatan 22 Juni 1945 yang disebut Hatta dalam kutipan di atas dikenal dalam sejarah pembuatan konstitusi kita dengan sebutan Piagam Jakarta yang sempat bertahan selama 57 hari sampai kata sebagai anak kalimat pengiring sila pertama Pancasila itu dicoret, demi kokohnya persatuan dan ketahanan nasional. Bukan saja anak kalimat itu yang dicoret, diktum-diktum lain yang memuat nafas kata itu juga dibuang dari batang tubuh konstitusi kita. Sekali lagi demi keutuhan bangsa dan negara, sekalipun pada tahun 1950-an hilangnya kata itu digugat

¹¹ Mohammad Hatta, *Memoir*. Jakarta: Tintamas, 1978, hlm. 454-456. Teks asli dalam huruf tegak biasa, perkataan Diskriminasi dicetak miring, sedang garis bawah dari saya untuk membedakannya dengan teks lainnya dalam makalah ini yang bercetak miring biasa.

² *Ibid.*, hlm. 457.

lagi oleh sementara tokoh Islam. Di sini terlihat toleransi golongan mayoritas dalam masalah fundamental konstitusional itu hampir-hampir tidak ada tandingannya dalam sejarah modern Indonesia. Bisa dibayangkan apa kiranya yang akan berlaku pada sebuah negara yang baru berusia jam-jaman itu sekiranya pemimpin-pemimpin Islam tetap ngotot dengan mempertahankan kesepakatan 22 Juni 1945 itu. Hatta membayangkan akan terjadi malapetaka, yaitu republik muda itu akan pecah.

Proses pencoretan kata itu berlangsung singkat tanpa perdebatan sengit. Semua pihak sama-sama menyadari kritisnya situasi. Masing-masing harus berlapang dada. Sebelum sidang Panitia Persiapan pagi hari pada 18 Agustus 1945, Hatta memanggil tokoh-tokoh golongan Islam untuk membicarakan masalah politik fundamental yang berkaitan dengan pelaksa-

naan syari'at Islam itu. Tokoh-tokoh yang diajak berunding itu adalah: Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai wakil Sumatera³. Hanya dalam tempo 15 menit masalah krusial yang peka itu dapat diselesaikan. Keutuhan bangsa dan negara tidak jadi goyang, dan jadilah sila pertama Pancasila berbunyi: Ke Tuhanan Yang Maha Esa⁴, sekalipun menurut Hatta semangat Piagam Jakarta tidaklah lenyap. Umat Islam dapat saja misalnya membuat undang-undang melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang sesuai dengan jiwa syari'at. "Dengan cara begitu," tulis Hatta, "lambat laun terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu sistem Syari'ah Islam yang teratur dalam Undang-Undang, berdasarkan Quran dan Hadith, yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam sekarang."⁵ Hatta sadar sepenuhnya

³ Menurut catatan tokoh Masyumi Prawoto Mangkusasmito, Wahid Hasjim tidak hadir dalam pertemuan 18 Agustus itu karena sedang pergi ke Jawa Timur. Jadi berbeda dengan catatan Hatta (lih. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 52. Jika catatan Prawoto itu faktual, maka yang benar-benar mewakili golongan Islam adalah Ki Bagus dan Kasman. Yang kedua ini adalah pendatang baru sebagai anggota tambahan Panitia Persiapan.

⁴ Istilah Ketuhanan Yang Maha Esa sudah dijumpai dalam pidato Soekarno, Lahirnya Pancasila. Jakarta: Departemen Penerangan RI., 1962, hlm. 28, ditempatkan dalam urutan sila kelima, sedangkan dalam konsep Piagam Jakarta menjadi sila pertama. Kita kutip: "Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!" (Teks asli dalam ejaan lama).

⁵ Hatta, *op. cit.*, hlm. 457. Perkataan yang diberi garis bawah, aslinya sudah dicetak miring.

bahwa pelaksanaan syari'at haruslah dengan mempertimbangkan ruang dan waktu, suatu gagasan yang sesuai dengan kaidah Ushul al-Fiqh yang berbunyi: "... taghayyur al-ahkam bitaghayyur alazman."⁶ (... perubahan hukum menurut perubahan zaman). Apa yang dikenal dengan hukum syari'at untuk sebagian besar dirumuskan berdasarkan ijtihad para fuqaha (pakar hukum Islam) jauh sebelum munculnya abad modern. Pelaksanaan hukum Islam yang tidak menghiraukan tuntutan ruang dan waktu pasti akan dihadapkan kepada kendala-kendala yang tidak kecil. Rupanya Hatta sangat peduli dengan persoalan keterkaitan pelaksanaan hukum dengan mengantisipasi perubahan sosial yang berlaku sepanjang zaman.

Sebenarnya bila pemikiran Hatta ini dijadikan acuan oleh tokoh-tokoh Islam pada bulan-bulan menjelang proklamasi dan kemudian pada periode 1950-an dalam sidang-sidang Majelis Konstituante, maka "perseteruan" antara Islam dan Pancasila yang mengganggu ketahanan nasional itu tidak perlu terjadi dan kecurigaan antarpemeluk agama tentang dasar negara akan dapat dihindari. Tapi me-

man pengalaman sejarah itu harganya mahal sekali. Sikap yang terbaik kemudian adalah agar semua pihak belajar sebanyak-banyaknya dari pengalaman itu untuk mengembangkan budaya kearifan, saling mengerti, saling memaafkan, dan saling menghormati antara golongan-golongan yang berbeda agama dan aliran politik dalam bingkai Republik Pancasila ini. Sekarang dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi sosial politik, di samping sebagai dasar filsafat negara yang sudah lama mantap, maka gangguan konstitusional ini telah dikubur untuk selama-lamanya. Pertanyaannya kemudian adalah: dengan telah disepakatinya masalah asas ini, apakah tidak ada lagi gangguan terhadap kesatuan dan ketahanan nasional? Jawabannya adalah: pasti akan selalu muncul gangguan itu karena kemungkinan sebab-sebab yang lain lagi, sebagaimana yang akan kita bicarakan pada saatnya nanti.

Selanjutnya untuk kepentingan ketahanan nasional kita tidak boleh melupakan modal dasar kita yang bernilai sangat tinggi. Modal itu adalah karena kita telah memiliki bahasa persatuan: Bahasa Indonesia sebagai simbol

6 Lih. Kamal Muchtar *et al.*, *Ushul Fiqh*, 2 jilid. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, 1: 150.

perekat yang sangat kuat, di sisi wataknya yang demokratik. Dengan modal Bahasa Indonesia sebagai unsur kultural yang sangat strategis, kita percaya bahwa cepat atau lambat demokrasi yang sehat akan tegak di republik ini. Coba bayangkan kalau Bahasa Jawa yang sarat dengan dimensi hierarkis kekuasaan feodal dan tidak mengenal konsep "daulat rakyat" itu misalnya dijadikan bahasa nasional, apakah cita-cita demokrasi menjadi mungkin untuk digaungkan di Indonesia? Saya rasa situasinya akan semakin rumit. Tentang konsep kekuasaan Jawa ini, keterangan Karkono Kamajaya Partokusumo, pakar kebudayaan Jawa, baik pula kita kutipkan di sini:

Kepemimpinan dalam kebudayaan Jawa itu ada tiga macam. Pertama kepemimpinan negara, kedua kepemimpinan desa, dan ketiga para pendeta. Pemimpin desa itu terdiri atas masyarakat pedesaan yang menjadi perpanjangan (tangan) dari pemerintah kerajaan. Sementara para pendeta di luar ibu kota kerajaan dengan perangkatnya tersendiri, tapi mereka sangat patuh kepada kerajaan. Raja itu satu kepala negara yang mempunyai wewenang luar biasa, absolut. Jadi kebudayaan atau masyarakat Jawa

mengenal sistem monarki absolut. Sejak dahulu sampai sekarang, sampai sebelum republik, tidak ada raja yang mempunyai konstitusi. Kalau di Inggris, meski kerajaan, tapi mempunyai undang-undang. Kalau di Jawa tidak ada. Jadi kekuasaan mutlak, bahkan raja adalah negara itu sendiri.⁷

Tingkat-tingkat Bahasa Jawa sebangun dengan dan mencerminkan stratifikasi sosial yang tidak demokratik itu. Maka adalah sebuah pekerjaan yang sangat sukar untuk mengubah konstruk sebuah kebudayaan dalam tempo yang singkat sebab akarnya sudah terlalu dalam dan berliku-liku. Dan dalam perspektif ini, kedatangan Islam tidak banyak pengaruhnya terhadap konsep kekuasaan Jawa, sebab Islam yang datang ke sini adalah juga Islam dengan jubah aristokrasi dinastik bukan Islam egaliter, sekalipun ada ungkapan: "raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah," khususnya pada kerajaan-kerajaan Islam di tanah "sabrang."

Tetapi mengapa pemimpin-pemimpin pergerakan, termasuk mereka yang berasal dari lingkungan kebudayaan Jawa, menerima dan kemudian bersama-sama menetapkan Bahasa Indonesia yang demokratis itu se-

7 Lih. Karkono Kamajaya Partokusumo, "Budaya Jawa Tidak Demokratis" dalam *Panji Masyarakat*, No. 32 Th. I (24 Nop. 1997), hlm. 12.

bagai bahasa nasional? Saya menafsirkan fenomena ini sebagai sebuah terobosan budaya dan sekaligus terobosan politik yang luar biasa. Bisa saja semua itu berlaku karena pengaruh pendidikan Barat yang mereka terima. Mereka mungkin merasa risih berkomunikasi dalam bahasa yang penuh sekatan dan hambatan kultural itu. Dalam sejarahnya, perkembangan Bahasa Indonesia sejalan dengan perkembangan Islam di kepulauan ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya tekankan bahwa dipilihnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan sebuah kearifan sejarah yang sangat tinggi nilainya bila dilihat antara lain dari perspektif ketahanan dan persatuan nasional. Padahal bahasa itu semula hanyalah milik suku minoritas Melayu di kepulauan Riau. Dan dalam tarikan nafas yang sama, kita menghargai dengan nilai yang sangat tinggi pula kesediaan suku mayoritas untuk menerima bahasa suku minoritas sebagai bahasa nasional. Kejadian ini memang luar biasa. Melihat kenyataan historis ini, kita patut mengacapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah s.w.t. atas kurnia-Nya yang melimpah kepada bangsa ini karena kita telah dibekali bahasa nasional yang kita banggakan semua, sekalipun pemakaiannya di ka-

langan sementara orang masih perlu pembenahan yang serius. Dengan ungkapan lain, melalui Bahasa Indonesia, cita-cita demokrasi lambat atau cepat akan terwujud, tidak hanya pada dataran teori tapi juga pada dataran praksis. Di sini terlihat sekali makna fundamental dari Sumpah Pemuda pada 1928 itu.

Kemudian faktor perekat kedua adalah agama Islam karena pemeluknya yang hampir merata di seluruh kepulauan nusantara. Di samping jumlah pemeluk yang mayoritas, Islam dalam doktrinnya mengajarkan prinsip persaudaraan orang beriman, di samping merupakan lawan terbesar bagi sistem budaya nepotisme yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Bahasa dan agama dengan demikian merupakan unsur terpenting dalam nasionalisme Indonesia, di samping faktor persamaan nasib dan pengalaman sejarah selama masa penjajahan. Karena jumlah pemeluk Islam merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia sejak sekitar abad ke-15/16, maka adalah logis bila frekuensi perlawanan terbanyak terhadap sistem kolonial juga dilakukan oleh mereka, sekalipun mereka hampir selalu kandas dalam mencapai tujuannya karena tidak mampu bersaing dalam perang modern dengan persenjataan yang sangat tidak seim-

bang. Sebagai unsur-unsur penting, bahasa dan agama sekaligus berfungsi sebagai kekuatan penyanggah bagi ketahanan nasional melalui akar sejarahnya yang telah mencuat kuat selama berabad-abad itu. Khusus mengenai bahasa seharusnya bangsa ini menyampaikan terimakasih yang dalam kepada rakyat Riau atas sumbangannya yang luar biasa melalui bahasa Melayu bagi kokohnya ketahanan dan integrasi nasional. Dalam perspektif kejadian baru-baru ini, semestinya oknum-oknum yang berbuat onar dengan membakar hutan di daerah Riau jangan lagi meneruskan petualangannya di masa datang, karena itu berarti sebuah kebiadaban dan pengkhianatan terhadap suku kecil yang telah begitu berjasa menyumbangkan bahasanya untuk ditetapkan menjadi bahasa persatuan. Begitu juga kekayaan alam yang diambil dari bumi Riau dan dari wilayah lain di nusantara haruslah digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi pasal 33 UUD 1945 yang ditafsirkan secara benar, jujur, dan konstitusional.

Perkataan "berdasar atas asas kekeluargaan" yang tercantum pada ayat 1 pasal di atas jangan diartikan macam-macam yang dalam kenyataan sosiologis ter-

nyata telah melahirkan nepotisme yang teramat parah dalam menggerogoti dan mengepung republik ini dari arah hulu, hilir, utara, selatan, timur, dan barat. Kalau ketahanan nasional tidak ingin mengalami kerapuhan, maka nepotisme harus dinyatakan sebagai kanker ganas dalam budaya bangsa kita, yang kalau tidak dibendung dengan kemauan dan keberanian politik yang kuat, akarnya akan merusak bangunan Pancasila dan UUD 1945 yang dikeramatkan itu. Bagi saya masalah ini sangat serius, dan oleh sebab itu siapa pun yang masih punya kepekaan sejarah dan nurani tidak boleh tinggal diam menyaksikan panorama budaya yang sedang sakit ini. Al-Qur'an dalam surat al-Taubah (9) ayat 24 dapat dijadikan landasan untuk menyatakan perang kepada segala bentuk nepotisme dan dampak destruktif yang mengiringinya.

Katakan: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, dan kaum keluargamu, perniagaan yang kamu khawatirkan akan rugi, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik."⁸

⁸ Lih. al Qur'an s. *al-Taubah* ayat 24.

Mencintai Allah, rasul, dan jihad di jalan-Nya dalam konteks ini berarti mencintai dan mau menegakkan kebenaran, keadilan, dan kewajaran tanpa pilih kasih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan perkataan "kaum yang fasik" bermakna mereka yang menyalahgunakan potensi akalunya untuk tujuan destruktif. Nepotisme adalah salah satu bentuk gejala sosial yang destruktif itu. Salah satu fungsi agama, agama apa pun, adalah untuk mengingatkan! Peringatan ini akan semakin perlu disampaikan apabila lembaga-lembaga, badan-badan, dan organisasi-organisasi sosial politik yang ada tidak dapat berfungsi secara efektif; kalau bukan telah lama tiarap, berhadapan dengan hegemoni kekuasaan dan sistem birokrasi yang korup. Bangsa kita menurut pantauan saya benar-benar sedang melintasi masa yang sangat kritis dalam perjalanan sejarahnya. Salah-salah dalam penanganan masalah-masalah fundamental yang kita hadapi, gambaran masa depan yang buram yang mungkin menimpa bangsa ini seperti yang dilukiskan Taufiq Ismail, bukan sesuatu yang mustahil. Kita bacakan lukisan itu:

Kelambanan kolektif kita akan diterjang tanpa ampun oleh kencang lajunya peradaban milenium yang akan datang, ketika batas-batas geografi dan berbagai sekat peraturan sudah diangkat orang. Kita yang dikenal lambat, lamban, lemban, lalai dan lengah akan tergeser, tergusur, tergasak dan kemudian tergeletak di pinggir jalan raya peradaban dunia.⁹

Lukisan ini mungkin terlalu tajam untuk dipandang dan terlalu keras untuk didengar, tapi masih adakah mata yang mau melihatnya dan telinga yang bersedia mendengarnya? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan apakah ketahanan nasional kita akan tetap kukuh di masa depan atau sebaliknya. Tenggang waktu untuk menjawabnya sudah tidak mungkin lagi didasarkan kepada diktum "alon-alon waton klakon," sebab segala sesuatu berjalan dengan serba cepat, tidak menentu, dan sukar sekali ditebak. Saya memperkirakan bahwa peradaban yang akan datang itu mungkin akan bertukar menjadi kebiadaban yang lebih mengerikan lagi jika prinsip-prinsip moral dunia tetap saja didasarkan sepenuhnya pada filsafat antroposentrisme yang sekuler dan menempatkan manusia sebagai pusat dan

9 Lih. Taufiq Ismail, *Perbandingan Pengajaran Sastra dan Pengajaran Mengarang di SMU 13 Negara*. Jakarta, 1997, hl. 58.

ukuran segala-galanya. Gagasan besar tentang nilai-nilai moral transendental telah lama digusur dari gelanggang percaturan hidup dunia yang semakin keras, kasar, dan bengis.

Pertanyaannya kemudian adalah: akan berdayakah agama dan Pancasila menghadapi abad yang tanpa batas geografis dan tanpa sekat itu? Tulisan ini tidak mampu menjawabnya. Paling-paling saya hanya bisa mengatakan: jika keretakan antara kata dan perbuatan berhasil dipertautkan dan kita tidak main-main dengan agama dan Pancasila, maka ada harapan bahwa bangsa ini akan dapat menolong dirinya dalam menghadapi gelombang peradaban atau kebiadaban yang akan datang itu. Tetapi bila kita tetap saja mempertunjukkan hipokrisi dalam cara berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, maka akibat buruknya yang sangat dahsyat akan diderita dan dibayar oleh generasi yang akan datang ketahanan nasional kita bisa jadi ambruk dan berantakan. Lebih-lebih bila lukisan buram Taufiq yang dikutip di atas benar-benar menerpa dan menerjang bangsa kita.

Agama, Negara, Ketahanan Nasional, dan Masalah Ketenaklaksanaan

Dalam konsep Islam, hubung-

an agama dan negara dapat digambarkan sebagai hubungan antara cita-cita moral-sosial-ke-manusiaan dengan alat untuk mencapai cita-cita itu. Dalam al-Qur'an dan literatur klasik Islam, kita tidak menjumpai ungkapan Negara Islam (al-daulah al-Islamiyyah). Istilah ini merupakan gejala abad ke-20. Oleh sebab itu Islam tidak mementingkan nama sebuah negara. Yang diinginkan Islam adalah agar cita-cita moralnya, cita-cita sosio-politik-ekonominya berupa keadilan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan, persamaan, persaudaraan, toleransi, kejujuran, dan nilai-nilai luhur lainnya dapat dibawa turun ke bumi. Semua nilai ini hanya mungkin terwujud bilamana tersedia kekuatan institusi yang mendukungnya. Alat dukung yang paling efektif itu adalah negara. Jadi dari sudut pandangan Islam, negara penting bagi agama, tanpa mempersoalkan nama negara itu. Kita ambil contoh soal zakat. Bila seseorang muslim sudah sampai pada tingkat wajib zakat misalnya, tapi dia membangkang, maka negara dapat memaksanya untuk membayarkan zakatnya itu, karena harta dalam doktrin Islam punya fungsi sosial. Begitu juga membela negara merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap warga negara Muslim. Yang menolak dapat dikena-

kan hukuman. Islam memang bukan hanya berurusan dengan masalah hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Tujuannya besarnya hanya satu, yaitu agar manusia dapat dengan baik dan adil melaksanakan amanah Allah sebagai bagian dari fungsi kekhalifahannya di muka bumi. Demikianlah secara sangat ringkas tentang hubungan agama dan negara.

Kemudian mari kita surut sebentar untuk melihat lagi hubungan Islam dan negara Republik Indonesia. Di bagian awal sudah kita jelaskan tentang pencoretan kata yang bermuatan Islam dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945, demi tegaknya negara ini secara kokoh dan golongan minoritas tidak merasa dianaktirikan. Kemudian melalui Undang-undang keormasan sejak 1985 pencoretan asas selain asas Pancasila juga diberlakukan pada semua organisasi, baik politik, sosial kultural maupun sosial keagamaan. Mula-mula ada dua-tiga organisasi yang berkeberatan mengganti asasnya itu. Tetapi lambat laun, setelah dipikir masak-masak, akhirnya asas Pancasila itu telah diterima dengan mantap oleh hampir seluruh kekuat-

an sosial dan politik di Indonesia, termasuk oleh NU (Nahdhatul Ulama) dan Muhammadiyah.

Apa artinya ini bila dikaitkan dengan masalah ketahanan nasional? Artinya ialah bahwa dari jurusan asas dan ideologi, gangguan dan ancaman terhadap ketahanan nasional, seperti yang telah disinggung di depan, tidak akan muncul kembali. Posisi Pancasila sudah demikian kokohnya, tidak ada satu kekuatan pun yang sedang atau akan mengancamnya secara konstitusional. Selain itu ideologi komunis yang sering mengacau itu juga sudah dilarang untuk selama-lamanya. Tetapi mengapa kecemasan tentang masalah integrasi bangsa dan ketahanan nasional masih saja muncul ke permukaan?

Sebenarnya kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri, sebab utama dari munculnya kecamasan itu adalah karena pada dataran praksisme Pancasila dengan butir-butirnya itu tetap tinggal dalam rumusan yang serba elok dan canggih tetapi hampir-hampir tidak ada dalam kenyataan empirik. Setiap saat kita menyebut Pancasila, tetapi setiap saat pula kita melecehkannya dalam perbuatan. Dengan fakta ini penataran P4 yang sudah berlangsung sejak 1978 telah gagal hampir total dalam memperbaiki moral bangsa. Kita tetap saja hidup dalam kekacauan dan ke-

galauan sistem nilai. Nasib agama dalam masalah moral bangsa ini tidak lebih baik daripada nasib Pancasila. Keduanya seakan-akan telah tersungkur berhadapan dengan arus materialisme hedonistik. Padahal Indonesia baru akan memasuki era industrialisasi, sedangkan situasinya sudah terasa mencekam.

Pada saat bangsa kita dilanda berbagai malapetaka: ekonomi, lingkungan, kemarahan alam, dan secara terselubung perpolitikan kita juga baru kelihatan stabil di permukaan, seharusnya bangsa ini mau melakukan introspeksi besar-besaran terhadap dirinya tentang berbagai penyimpangan yang berlaku selama ini. Sikap kesediaan mengoreksi diri itulah tampaknya yang sulit dilakukan, termasuk oleh mereka yang mengaku beragama. Agama menginginkan keteladanan, tapi justru keteladanan itulah sekarang mengalami krisis yang parah dari pucuk sampai ke akar rumput. Dengan kata lain, jika kita menginginkan ketahanan nasional tidak terancam, maka masalah keteladanan ini wajib mendapat perhatian yang serius dari kita, khususnya dari mereka yang menduduki posisi strategis di negara ini. Tanpa keteladanan ini, nilai-nilai agama dan Pancasila akan tetaplah tergantung di awang-awang atau tetap tinggal dalam konsep, sementara

kenyataan yang berjalan di depan kita justru mengkhianati nilai-nilai mulia itu semua, seperti yang telah kita ungkaptan di atas. Akibatnya rakyat kita dari ke hari semakin tidak berdaya, apatis, putus asa, dan menggerutu. Kumulasi dari semuanya itu dapat menimbulkan ledakan sosial yang dahsyat, sesuatu yang sama-sama kita takut. Kelanjutan logisnya nanti adalah kualitas dan kuantitas kejahatan dalam berbagai skala dan bentuk akan semakin menggilai, apalagi banyak perusahaan yang gulung tikar, modal dan uang nasabah bank dilarikan ke luar negeri oleh para pengkhianat, pengangguran buruh semakin tak terelakkan, depresi rupiah dirasakan berat sekali. Dalam keadaan yang serba tidak menentu itu, dosa-dosa sejarah berupa kemewahan, kerakusan, dan kesombongan belum juga berkurang diperlihatkan segelintir orang, sekalipun bangsa ini tertatih-tatih dibuatnya. Dalam menghadapi berbagai krisis ini agama tidak boleh tinggal diam, imbauan moral perlu terus disampaikan dengan cara-cara yang baik dan sopan, tetapi jangan menghasung pemeluknya untuk melakukan makar, sebab cara itu sama sekali bukan penyelesaian, bahkan akan menambah ruwetnya situasi yang sudah rawet.

Penutup

Dari apa yang dipaparkan di atas, melalui pengalaman sejarah yang panjang dan kadang-kadang sangat kritis, arus besar Islam di Indonesia dalam hubungannya dengan negara dalam perspektif ketahanan nasional, dapat kita katakan sebagai berikut. Demi kesatuan, persatuan, dan ketahanan nasional, Islam melalui para pemimpinnya telah menunjukkan komitmen dan toleransi yang sangat tinggi untuk menjaga republik ini agar tetap utuh, tidak tercabik-cabik oleh kekuatan destruktif mana pun. Tetapi umat Islam tidak dapat tinggal diam bila moral bangsa ini meluncur dari waktu ke waktu karena pelecehan terhadap pelaksanaan butir-butir Pancasila dan nilai-nilai agama tetap saja berlangsung, hampir-hampir tanpa kendali. Kita mengalami krisis keteladanan yang

akut. Oleh sebab itu semua pihak harus mau berkaca diri, melakukan introspeksi secara jujur terhadap perangai salah kita selama ini dalam mengurus bangsa yang kini sedang dilanda malapetaka dan keprihatinan yang mendalam. Namun sebagai bangsa besar, kita tidak boleh putus asa. Agama melarang keras umatnya untuk berputus harap, karena sifat putus asa bukan berasal dari iman, tapi dari kecengengan dan kelemahan manusia. Tetapi memang waktunya sudah sangat tinggi bagi kita untuk mengkaji ulang semua kebijaksanaan dan strategi pembangunan kita selama 30 tahun yang terakhir ini. Pengalaman sejarah sungguh merupakan guru yang terbaik asal saja nurani kita tidak dibiarkan tumpul untuk mengambil pelajaran dari masa lampau itu sebanyak-banyaknya, sejujur-jujurnya